

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 11 Kendari
 Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
 Kelas/ Semester : XII / 1
 Kompetensi Dasar : 3.3 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal
 4.3 Merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis
 Materi Pokok : Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa demokrasi Parlementer (1950-1959)
 Sub.Materi : Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
 Alokasi Waktu : 2x 45 Menit
 Pertemuan : 8

A. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer.
2. Menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer 1950-1959.

B. Alat dan Akses/sumber Belajar

1. **Alat** : Papan tulis, spidol, buku tulis, pena, handphone android dan laptop.
2. **Akses/sumber belajar** : buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.

C. Pendekatan /Model/Metode Pembelajaran

1. **Pendekatan** : Sainifik (scientific).
2. **Model** : Discovery learning.
3. **Metode** : Tanya jawab, diskusi dan penugasan.

D. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	
	LURING	DARING
Pendahuluan	<p>Kegiatan Pendahuluan Guru : Orientasi(Menunjukkan sikap disiplin sebelum memulai proses pembelajaran, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut (Karakter) serta membiasakan membaca dan memaknai (Literasi)).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran(PPK : Religius) ❖ Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin ❖ Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 	<p>Melalui <i>google classroom, Google Met/Zoom/WA</i>, guru mengawali pembelajaran dengan salam, membimbing peserta didik untuk berdoa serta menanyakan keadaan dan kesiapan peserta didik. Kemudian, menyiapkan peserta didik dan memotivasi, apersepsi, menyampaikan tujuan, menjelaskan garis besar kegiatan.</p>
Inti	<p>Mengamati Peserta didik mengamati materi Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal dari berbagai sumber, baik yang disediakan guru maupun pencarian mandiri</p> <p>Menanya peserta didik diberi permasalahan dalam bentuk pertanyaan seputar Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal (HOTS).</p> <p>Mengumpulkan informasi : Peserta didik melakukan kegiatan pengumpulan informasi atau data terkait pertanyaan- pertanyaan yang harus dipecahkan secara mandiri dengan dibimbing oleh guru</p> <p>Mengasosiasi : peserta didik boleh saling berdiskusi ataupun menanyakan kepada guru tentang data atau informasi yang didapatkan.</p> <p>Mengkomunikasi : peserta didik mengkomunikasikan hasil belajarnya secara tertulis.</p>	<p>Melalui <i>google classroom, Google Met/Zoom/WA</i> ,yang diintegrasikan dengan media lainnya, peserta didik diarahkan untuk mengamati,Merumuskan pertanyaan,Mengumpulkan informasi,Mengasosiasi,Mengkomunikasikan materi tentang Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal dari berbagai sumber, baik yang disediakan guru maupun pencarian mandiri.</p>
Penutup	<p>Membuat resume (kesimpulan) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal</p> <p>Menutup pembelajaran dengan mengucapkan Salam</p>	<p>Melalui <i>google classroom, Google Met/Zoom/WA</i>, disampaikan poin-poin penting dalam pembelajaran, refleksi, dan menjelaskan rencana pertemuan selanjutnya.</p>
E. Penilaian		
Sikap	Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. <i>Terlampir</i>	
Pengetahuan	Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. <i>Terlampir</i>	
Keterampilan	Penilaian keterampilan dilakukan melalui <i>Terlampir</i> produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.	

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Suradin Daaba, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19710623 199702 1 003

Kendari, Juli 2021
Guru Mata Pelajaran " Sejarah Wajib,

Lukman Hakim, S.Pd,M.Pd
NIP. 198605212010011009

LAMPIRAN PENILAIAN DAN MATERI

A. PENILAIAN SIKAP

K ISI-KISI PENILAIAN SIKAP

NO	NILAI KARAKTER/ SIKAP YANG DINILAI/ DITUMBUHKAN	SUB NILAI KARAKTER/SIKAP YANG DIKEMBANGKAN	INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP
1	Religius	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti buli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih	1. Jurnal Observasi Sikap 2. Lembar Observasi Sikap 3. Penilaian Diri 4. Penilaian Antar Teman
2	Integritas	Apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama	
3	Nasionalis	Etos kerja (kerja keras), tangguhtahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat	
4	Gotong Royong	Etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat	
5	Mandiri	kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggungjawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas).	

- Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No.	Nama	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Ket: Predikat

A nilai 91-100,

B nilai 84-90

C nilai 75-83

Kendari, Juli 2021

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Suradin Daaba, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19710623 199702 1 003

Kendari, Juli 2021
Guru Mata Pelajaran " Sejarah Wajib,

Lukman Hakim, S.Pd,M.Pd
NIP. 198605212010011009

PENILAIAN PENGETAHUAN

Kisi-Kisi Tugas 3

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 11 KENDARI
Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
Kelas /Semester : XII/Ganjil
Tahun Pelajaran : 2021/2022

No.	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator	Teknik Penilaian
1	3.3 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal	→ Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parleментар (1950-1959)	3.3.1 Menganalisis dinamika perkembangan cabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parleментар 1950-1959. 3.3.2 Melakukan presentasi hasil diskusi mengenai dinamika perkembangan cabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parleментар 1950-1959 berupa hand out/ alat peraga/ makalah/ powerpoint. 3.3.3 Menjelaskan perkembangan sistem kepartaian yang berlangsung selama masa Demokrasi Parleментар 1950-1959. 3.3.4 Membandingkan sistem kepartaian pada masa Demokrasi Parleментар 1950-1959 dengan sistem pemerintahan pada masa sekarang.	Penugasan

Tugas:

- Buatlah mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Parleментар!

Pedoman Penskoran Tugas

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1.	Kesesuaian dengan konsep dan prinsip	0-3
2.	Ketepatan memilih bahan	0-3
3.	Kreativitas	0-3
4.	Ketepatan waktu pengumpulan tugas	0-3
5.	Kerapihan hasil	0-3
Skor maksimum		6

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{\text{Total Skor Maksimum}} = 100$$

Kendari, Juli 2021

Mengetahui, Kepala Sekolah Suradin Daaba, S.Pd.,M.Pd NIP. 19710623 199702 1 003	Kendari, Juli 2021 Guru Mata Pelajaran " Sejarah Wajib, Lukman Hakim, S.Pd,M.Pd NIP. 198605212010011009
---	---

EVALUASI

Kisi-Kisi Tes Tertulis 3

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 11 KENDARI
 Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
 Kelas /Semester : XII/Ganjil
 Tahun Pelajaran : 2021/2022

No	Kompetensi Dasar	Materi/ Sub Materi	Indikator Soal	Bentuk Soal	Jmlh Soal
1	3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal	→ Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)	3.4.1 Menganalisis dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer 1950-1959. 3.4.2 Melakukan presentasi hasil diskusi mengenai dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer 1950-1959 berupa hand out/ alat peraga/ makalah/ powerpoint. 3.4.3 Menjelaskan perkembangan sistem kepartaian yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer 1950-1959. 3.4.4 Membandingkan sistem kepartaian pada masa Demokrasi Parlementer 1950-1959 dengan sistem pemerintahan pada masa sekarang.	Uraian	1

Butir Soal Uraian

KARTU SOAL			
Satuan Pendidika : SMA NEGERI 11 KENDARI Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia Tahun Pelajaran : 2021/2022	Nama Penyusun : Tempat Tugas :		
Materi Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)	Buku Sumber : Buku Guru dan Buku Siswa, Kemendikbud 2018		
Indikator Soal Menjelaskan Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)	Rumusan Butir Soal 1. Apa dasar diberlakukannya Demokrasi Parlementer? 2. Tuliskan nama-nama kabinet yang memerintah tahun 1950-1959!		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="padding: 2px 10px;">No.Soal</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px 10px;">1</td></tr> </table>	No.Soal	1	
No.Soal			
1			
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="padding: 2px 10px;">No.Soal</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px 10px;">1</td></tr> </table>	No.Soal	1	
No.Soal			
1			

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{\text{Total Skor Maksimum}} = 100$$

No.	Pertany	Kunci Jawaban	Poin
1.	Apa dasar diberlakukannya Demokrasi	UUD Sementara 1950.	50
2.	Tuliskan nama-nama kabinet yang memerintah tahun 1950-1959!	Dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet mulai Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951; Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952; Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953; Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955; Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956; Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957; dan Kabinet Djuanda	50
			100

Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Remedial

- ❖ Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Remedial terdiri atas dua bagian : remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai Kompetensi Dasar
- ❖ Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut.
 - Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks pelajaran sejarah pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks sejarah Bab 1. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

b. Pengayaan

- ❖ Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi Dasar.
- ❖ Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
- ❖ Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya
 - Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab 1. Selain itu, peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

Kendari, Juli 2021

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Suradin Daaba, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19710623 199702 1 003

Kendari, Juli 2021
Guru Mata Pelajaran " Sejarah Wajib,

Lukman Hakim, S.Pd,M.Pd
NIP. 198605212010011009

PENILAIAN KETERAMPILAN

Penilaian Keterampilan

- a. Unjuk kerja : Praktik/Pedoman Penskoran
- b. Proyek : Petunjuk mengerjakan proyek/Rubrik Penilaian
- c. Produk : Petunjuk/Rubrik Penilaian
- d. Portofolio : E-Portofolio

Bentuk lain (tes tertulis) : Soal, Rubrik penilaian

Format Nilai Tugas Kelompok

Keterangan Skor :

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :

4= Baik Sekali

3= Baik

2= Cukup



1= Kurang

Σ Skor perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\Sigma \text{Skor perolehan}}{\text{Skor Maksimal (20)}} \times 100$$

Kriteria Nilai	
A=91 – 100	Baik Sekali
B=84 – 90	Baik
C=75 – 83	Cukup

KISI-KISI PENILAIAN KETERAMPILAN

Kompetensi Dasar	IPK	MATERI	INDIKATOR SOAL	BENTUK SOAL/ INSTRUMEN PENILAIAN
3.1. Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal	1. Melihat gambar, video dan/atau menyimak penjelasan guru  Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal - Sistem Pemerintahan	1. Fakta Peristiwa 17 Oktober 1952.	Membuat dan mengajukan pertanyaan/ tanya jawab tentang Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal - Sistem Pemerintahan	Praktik
4.3 Merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis	2. Membuat dan mengajukan pertanyaan/ tanya jawab tentang  Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal - Sistem Pemerintahan 3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai ancaman disintegrasi bangsa 4. Menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang	2. Konsep Menjelaskan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan ➢ Menjelaskan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal ➢ Menjelaskan perkembangan	Mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal - Sistem Pemerintahan Menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan mengenai	Proyek Produk

<p>dikumpulkan mengenai ? Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal</p> <p>- Sistem Pemerintahan</p> <p>5. Membuat hasil penelaahan dalam bentuk tulisan mengenai ? Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal</p> <p>- Sistem Pemerintahan</p>	<p>3. Prinsip</p> <p>➤ Menganalisis pentingnya Konferensi Asia Afrika bagi perjuangan RI merebut Irian</p> <p>➤ Mengkomunikasikan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya merebut kembali Irian.</p> <p>➤ Menjelaskan latar belakang timbulnya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia</p> <p>4. Prosedur</p> <p>➤ Merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi</p>	<p>Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal</p> <p>- Sistem Pemerintahan</p> <p>Membuat hasil penelaahan dalam bentuk tulisan mengenai Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal</p> <p>- Sistem Pemerintahan</p>	<p>Tes Tertulis (uraian)</p> <p>Tes Tertulis (uraian)</p>
--	--	--	---

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN/SOAL TES

1. Praktik
 - Siswa disuruh kedepan dan mempresentasikan Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
 - Sistem Pemerintahan
2. Proyek
 - Siswa membuat tugas dengan kertas Doublefolio tentang Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
 - Sistem Pemerintahan
3. Portofolio
 - Kumpulan tugas tugas terbaik siswa.

Keterangan Skor :
 Masing – masing kolom diisi Kriteria:
 4 = Baik Sekali
 3 = Baik
 2 = Cukup
 1 = Kurang
 Kriteria Nilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal (20)}} \times 4$$

A	91 - 100	Baik Sekali
B	84 – 90	Baik
C	83 – 75	Cukup
D	< 76	Kurang

Rubrik Penskoran Penilaian Praktik

No.	Aspek yang Dinilai	Skor				
		0	1	2	3	4
1.	Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.					
2.	Melakukan praktik dengan benar.					
Jumlah						
Skor Maksimum		6 (2+4)				

Rubrik Penilaian Praktik

No	Indikator	Rubrik
1.	Menyiapkan alat dan bahan	2 : Menyiapkan <i>seluruh</i> alat dan bahan yang diperlukan. 1 : Menyiapkan <i>sebagian</i> alat dan bahan yang diperlukan. 0 : Tidak menyiapkan alat bahan
2.	Melakukan Praktik	4 : Melakukan empat langkah kerja dengan tepat. 3 : Melakukan tiga langkah kerja dengan tepat. 2 : Melakukan dua langkah kerja dengan tepat. 1: Melakukan satu langkah kerja dengan tepat. 0: Tidak melakukan langkah kerja.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{\text{Total Skor Maksimum}} = 100$$

Kendari, Juli 2021

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Kendari, Juli 2021
Guru Mata Pelajaran “ Sejarah Wajib,

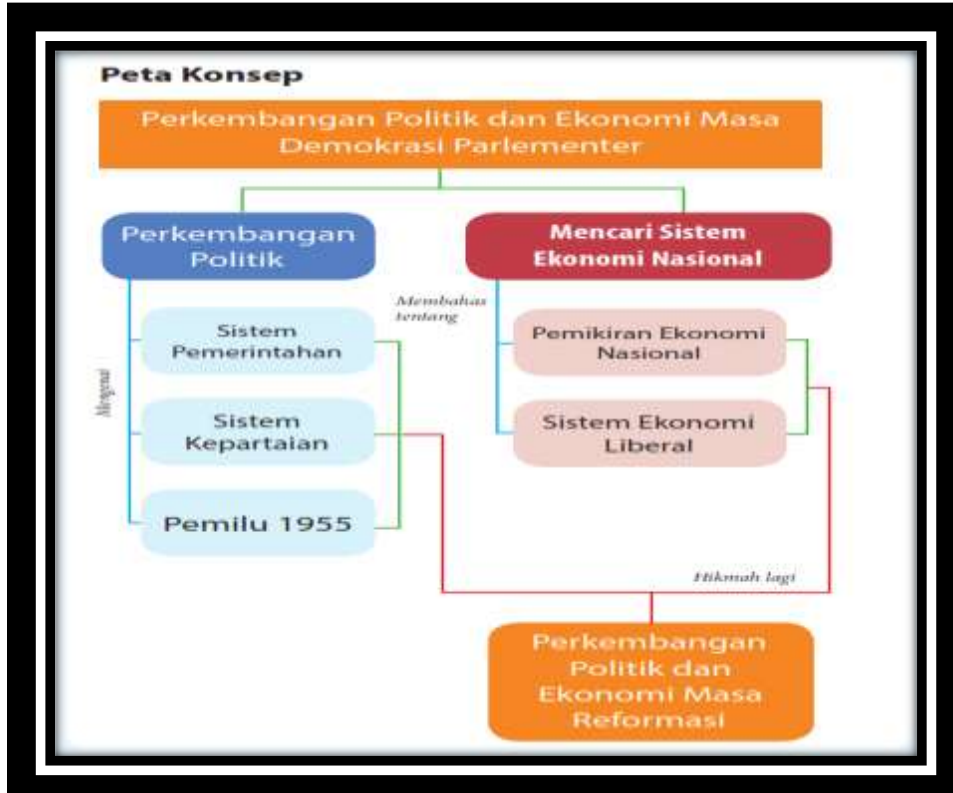
Suradin Daaba, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19710623 199702 1 003

Lukman Hakim, S.Pd,M.Pd
NIP. 198605212010011009

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (KLPD)

Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
Kelas : XII
Materi : Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer (1950-1959)
Sub.Materi : perkembangan politik masa demokrasi liberal ,sistem pemerintahan
Guru : Sitawati B.Ladjamu.SPd

NAMA SISWA	
KELOMPOK	
KELAS	



PENGAMATAN GAMBAR



➤ Perhatikan gambar di atas!

1. Apa komentar kamu tentang banyaknya partai politik di Indonesia?
2. Coba kamu diskusikan dengan guru, dampak banyaknya partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TUGAS PENGETAHUAN

Tugas: (PR)

- **Buat rangkuman tentang salah satu partai pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959 sebanyak satu halaman. Setelah dinilai oleh guru kalian, Jilid atau tempel rangkuman tersebut di mading kelas!**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TUGAS KETERAMPILAN

DISKUSI KELOMPOK

Tugas

- ❖ Mendiskusikan *Berpikir kritis, kreatif, bekerjasama dan saling berkomunikasi dalam kelompok (4C), dengan rasa ingin tahu dan pantang menyerah (Karakter)*
 - Setiap kelompok mendapatkan tugas melakukan eksplorasi melalui diskusi kelompok sehingga menemukan rumusan dari masing-masing tugas yang diberikan:
 - Kelompok 1 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Natsir.
 - Kelompok 2 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Sukiman.
 - Kelompok 3 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Wilopo.
 - Kelompok 4 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Ali Sastroamidjoyo I.
 - Kelompok 5 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Burhanuddin Harahap.

Kelompok 1

- 1.
- 2.

Kelompok 2

- 1.
- 2.

Kelompok 3

- 1.
- 2.

Kelompok 7

- 1.
- 2.

Kelompok 4

- 1.
- 2.

Kelompok 5

- 1.
- 2.

Kelompok 6.

- 1.
- 2.

SELAMAT MENERJAKAN

Lampiran Materi Sejarah Indonesia KD 3.3

Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

A. Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal Mengamati Lingkungan



Sumber: Atlas Nasional (2012)
Gambar 2.1 Partai Peserta Pemilu 1955.

Perhatikan gambar di atas!

1. Apa komentar kamu tentang banyaknya partai politik di Indonesia?
2. Coba kamu diskusikan dengan guru, dampak banyaknya partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!

1. Sistem Pemerintahan

Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai satu tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai perdana menteri. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan UUD. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem

parlementer dilandasi oleh Konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali UUD 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula Demokrasi Liberal, sehingga era ini dikenal sebagai zaman Demokrasi Liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zaken Kabinet. Kalau kita perhatikan garis besar perjalanan kabinet di atas, nampak bahwa mula-mula Masyumi diberi kesempatan untuk memerintah, kemudian PNI memegang peranan terutama setelah Pemilihan Umum 1955. Namun PNI pun tidak bisa bertahan lama karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yang akhirnya dibentuk zaken kabinet di bawah pimpinan Ir. Djuanda. Kabinet-kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat (saat ini Papua dan Papua Barat). Namun, setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing, kabinet yang dipimpin Masyumi menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri.

Apabila kita teliti kabinet-kabinet tersebut satu persatu maka akan nampak hal-hal yang menarik. Kabinet Natsir (1950-1951), ketika menyusun kabinetnya, Natsir bermaksud menyusun kabinet dengan melibatkan sebanyak mungkin partai agar kabinetnya mencerminkan sifat nasional dan mendapat dukungan parlemen

yang besar. Namun pada kenyataannya, Natsir kesulitan membentuk kabinet seperti yang diinginkan, terutama kesulitan dalam menempatkan orang-orang PNI dalam kabinet. Sehingga Kabinet Natsir yang

terbentuk pada 6 September 1950, tidak melibatkan PNI di dalamnya. PNI menjadi oposisi bersama PKI dan Murba.

Latar belakang masalah dalam pembentukan kabinet sering kali menjadi faktor yang menyebabkan goyah dan jatuhnya kabinet. Hal ini terlihat ketika Kabinet Natsir menjalankan pemerintahannya, kelompok oposisi segera melancarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsir. Kabinet Natsir dihadapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP. No. 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen. Hal ini menyebabkan menteri dalam negeri mengundurkan diri. Kondisi ini menyebabkan hubungan kabinet dengan parlemen tidak lancar yang akhirnya menyebabkan Natsir menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada 21 Maret 1951.

Jatuhnya Kabinet Natsir, membuat Presiden Soekarno mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin partai untuk memilih tim formatur kabinet yang kemudian menghasilkan Kabinet Sukiman pada tanggal 26 April 1951. Berbeda dengan kabinet sebelumnya yang tidak melibatkan PNI dalam pemerintahannya, kabinet Sukiman berhasil melibatkan PNI di dalamnya, sehingga Kabinet Sukiman didukung oleh dua partai besar, Masyumi dan PNI. Partai-partai pendukung Kabinet Sukiman, melalui menteri-menterinya yang duduk dalam pemerintahan, berusaha merealisasi program politik masing-masing, meskipun kabinet telah memiliki program kerja tersendiri. Hal ini merupakan benih-benih keretakan yang melemahkan kabinet. Sebagai contoh adalah Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq (PNI) yang menginstruksikan untuk menonaktifkan DPRD-DPRD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39/1950. Selain itu, Iskaq juga mengangkat orang-orang PNI menjadi Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. Tindakan ini yang menimbulkan pertikaian politik dan konflik kepentingan.

Kebijakan lain yang menimbulkan masalah dalam hubungan antara pemerintah dan parlemen adalah ketika Menteri Kehakiman, Muhammad Yamin, membebaskan 950 orang tahanan SOB (Staat van Oorlog en Beleg, negara dalam keadaan bahaya perang) tanpa persetujuan perdana menteri dan anggota kabinet lainnya. Kebijakan ini ditentang oleh Perdana Menteri Sukiman dan kalangan militer yang mengakibatkan Muhammad Yamin meletakkan jabatannya sebagai menteri kehakiman.

Kondisi Kabinet Sukiman semakin terguncang ketika muncul mosi tidak percaya dari Sunarjo (PNI). Munculnya mosi ini berkaitan dengan penandatanganan perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat. Hal ini berawal dari nota jawaban yang diberikan Subardjo terhadap Cochran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota menteri luar negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional. Tindakan Subardjo ini dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. Mosi ini kemudian disusul oleh pernyataan PNI agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada presiden untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Akhirnya, dengan didahului pengunduran diri Achmad Subardjo selaku Menteri Luar Negeri, Sukiman pun kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952.

Kalau dibandingkan dengan Kabinet Natsir, dalam Kabinet Sukiman jelas menunjukkan bahwa partai-partailah yang memegang pemerintahan. Mulai dari menyusun program, portopolio, komposisi personalia, pelaksanaan dan tanggung jawab serta cara penyelesaian masalah sepenuhnya terletak di tangan partai. Partai-partai yang ada pada waktu itu belum nampak menonjolkan ideologi masing-masing, perhatiannya masih ditunjukkan pada pemecahan masalah-masalah praktis yang dihadapi.

Kemudian Presiden Soekarno memberikan mandat kepada golongan moderat dari PNI sehingga terbentuk kabinet Wilopo pada 30 Maret 1952. Kabinet ini mendapat dukungan yang lebih luas dibandingkan dengan kabinet sebelumnya, yaitu dengan masuknya PSI dan PSII dalam pemerintahan. Dukungan ini memperkuat upaya kabinet dalam memperoleh dukungan mayoritas di Parlemen. Kondisi ini mempengaruhi iklim politik dalam kabinet dan juga hubungan antarpantai. Ikut sertanya PSII dan Parindra dalam pemerintahan, dan karena PKI, sejak Kabinet Amir Syarifuddin, selalu menjadi oposisi, mendukung Kabinet Wilopo, maka Badan Permusyawaratan Partai-partai (PKI, PSII, Pertii, Partai Buruh, Partai Murba, Permai, Partai Tani Indonesia, PRN, Parindra, Partai Rakyat Indonesia dan Partai Indo Nasional) kehilangan artinya dan menghentikan kegiatan-kegiatannya. Dengan adanya hubungan politik baru ini, praktis berakhirlah aksi-aksi pemogokan yang banyak terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman.

Kabinet ini memiliki tugas pokok menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Namun sebelum tugas ini dapat diselesaikan, kabinet ini harus meletakkan jabatannya. Faktor yang menyebabkannya antara lain peristiwa 17 Oktober 1952.

Pada saat itu ada desakan dari pihak tertentu agar Presiden Soekarno segera membubarkan Parlemen yang tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh golongan tertentu dalam tubuh TNI-AD untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini tidak menyetujui Kolonel Nasution sebagai KSAD. Pihak-pihak tertentu dalam parlemen menyokong dan menuntut agar diadakan perombakan dalam pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI. Ini dianggap oleh pimpinan TNI sebagai campur tangan sipil dalam urusan militer. Setelah itu pimpinan TNI menuntut Presiden membubarkan Parlemen. Namun Presiden menolak tuntutan ini, sehingga KSAD dan KSAP diberhentikan dari jabatannya.

Keberlangsungan Kabinet Wilopo semakin terancam ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeniging (DPV). Tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV. Usaha pembebasan tanah ini mendapat

perlawanan dari penduduk. Karena menghadapi hambatan, pemerintah kemudian menggunakan alat-alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari lokasi tersebut. Atas perintah Gubernur Sumatera Timur, tanah garapan tersebut kemudian ditaraktor oleh polisi yang kemudian mendapatkan perlawanan dari petani yang mengakibatkan insiden yang menelan korban meninggalnya 5 orang petani. Peristiwa ini memunculkan mosi di Parlemen yang menuntut kepada pemerintah agar menghentikan sama sekali usaha pengosongan tanah yang diberikan kepada DPV sesuai dengan keputusan Pemerintahan Sukiman dan semua tahanan yang terkait dengan peristiwa Tanjung Morawa segera dibebaskan. Desakan-desakan ini akhirnya membuat Kabinet Wilopo jatuh.

Jatuhnya Wilopo membuat Presiden Soekarno mengalihkan mandatnya ke partai lain, setelah Masyumi dan PNI mengalami kegagalan. Presiden menetapkan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) dan Kabinet terbentuk pada 30 Juli 1953 dengan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini bertujuan melanjutkan tugas Kabinet Wilopo, menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Parlemen dan Anggota Dewan Konstituante. Sekalipun kabinet ini berhasil dalam politik luar negeri, yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada April 1955, namun harus meletakkan jabatannya sebelum tugas utamanya dapat dilaksanakan. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet adalah masalah pimpinan TNI-AD yang berpangkal pada Peristiwa 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan kabinet ini ditolak oleh korps perwira, kelompok Zulkifli Lubis, sehingga timbul krisis kabinet. Menghadapi persoalan dalam tubuh TNI-AD, Parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap menteri pertahanan. Sebagai dampak dari mosi tersebut, fraksi progresif dalam Parlemen menarik Mr. Iwa Kusumasumantri dari jabatannya sebagai menteri pertahanan pada 12 Juli 1955. Tidak lama berselang setelah itu, kabinet akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1955.

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo I dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat Presiden, Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji, segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet mempunyai tugas pokok membentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang terdiri atas orang-orang yang jujur dan disegani. Tuntutan ini kemudian berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap diumumkan.

Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas tersebut berhasil dilaksanakan, meskipun harus melalui rintangan-rintangan yang berat. Pada tanggal 27 September 1955 pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada 15 Desember 1955. Setelah

menyelesaikan tugasnya Kabinet Burhanuddin meletakkan jabatannya. Kemudian dibentuk suatu kabinet baru berdasarkan kekuatan partai politik yang ada dalam parlemen baru hasil pemilihan umum.

Selain masalah pemilihan umum, kabinet ini juga berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI-AD dengan diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai KSAD pada Oktober 1955. Program lainnya yang berusaha dilaksanakan pada masa kabinet ini adalah masalah politik luar negeri dan perundingan masalah Irian Barat.

Perkembangan politik pasca Pemilihan Umum 1955 memperlihatkan tanda renggangnya dwi tunggal Soekarno-Hatta. Pada tanggal 1 Desember 1955, Hatta mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden. Pengunduran diri Hatta ini merupakan reaksi politis atas ketidakcocokan Hatta terhadap pernyataan yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Dalam salah satu pidatonya Presiden Soekarno mengatakan bahwa ia akan sangat gembira apabila para pemimpin partai berunding sesamanya dan memutuskan bersama untuk mengubur partai-partai.

Hatta sebagai seorang demokrat masih percaya pada sistem demokrasi yang bercirikan banyak partai. Perbedaan antara Soekarno dan Hatta tidak hanya muncul pada tahun 1950-an, namun sejak masa pergerakan nasional pun kedua tokoh ini telah terjadi perbedaan pemikiran. Masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan perjuangan revolusi membawa kedua tokoh ini melupakan perbedaan yang ada sehingga disebut dwi tunggal. Namun, setelah tahun 1950-an tampak perbedaan menyangkut masalah demokrasi telah memecahkan mitos dwi tunggal. Sistem demokrasi konstitusional sangat didambakan Hatta sedangkan Soekarno menganggap sistem tersebut tidak cocok untuk bangsa Indonesia.

Soekarno yakin bahwa gerakan komunisme bisa dikendalikan, sedangkan Hatta sangat menentang gerakan komunisme dan menganggapnya sebagai bahaya laten yang harus dilenyapkan.

Pergolakan politik dan keadaan keamanan yang semakin memburuk telah mendorong Soekarno mengeluarkan Konsep Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Sejak saat itu Presiden Soekarno mengambil alih pemerintahan dan mendorong dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin, suatu konsep demokrasi yang sangat diidamkan oleh Soekarno namun sangat ditentang oleh Hatta. Sikap Hatta ini diungkapkannya dalam tulisannya "Demokrasi Kita". Hatta menuliskan bahwa "bagi saya yang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien ada baiknya diberikan kesempatan yang sama dalam waktu yang layak apakah sistem itu akan menjadi suatu sukses atau kegagalan".

Penunjukkan tim formatur untuk membentuk kabinet setelah Pemilihan Umum 1955 agar berbeda dengan sebelumnya. Setelah Pemilihan Umum 1955, Presiden Soekarno menunjuk partai pemenang pemilu sebagai pembentuk formatur kabinet. PNI yang ditunjuk Soekarno sebagai formatur kabinet mengajukan Ali

Sastroamidjojo dan Wilopo calon formatur kabinet. Presiden Soekarno kemudian memilih Ali Sastroamidjojo. Kabinet yang terbentuk berintikan koalisi PNI, Masyumi dan NU. Dalam pembentukan kabinet tidak ada kesulitan yang prinsipil. Koalisi yang terbentuk memunculkan pertanyaan mengapa PKI yang menduduki peringkat keempat pemilu tidak disertakan. Hal ini karena Masyumi menolak masuknya PKI dalam kabinet. Pada waktu formatur menyerahkan susunan kabinet kepada Presiden Soekarno untuk disetujui, Presiden tidak langsung menyetujui. Ia kecewa dengan susunan kabinet yang akan dibentuk yang tidak melibatkan PKI. Presiden menghendaki masuknya PKI dalam kabinet. Namun kehendak Presiden tidak bisa diterima oleh formatur karena susunan kabinet yang dibentuk merupakan hasil persetujuan dari partai-partai yang akan berkoalisi.

Menyikapi hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian berusaha mendesak para tokoh partai PNI, Masyumi, NU dan PSII agar mau menerima wakil PKI atau pun simpatisannya untuk duduk dalam kabinet. Namun kehendak Presiden Soekarno tersebut tidak bisa diterima oleh tokoh-tokoh dari ketiga partai tersebut. Presiden Soekarno pun akhirnya menyetujui susunan kabinet yang telah disusun oleh tim formatur, dengan memasukkan Ir. Djuanda dalam kabinet. Pada tanggal 20 Maret 1956, kabinet koalisi nasionalis-Islam dengan Ali Sastroamidjojo selaku Perdana Menteri. Kabinet ini dikenal sebagai Kabinet Ali II (1956-1957). Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama yang memiliki Rencana Lima Tahun yang antara lain isinya mencakup masalah Irian Barat, masalah otonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan dan pembentukan ekonomi keuangan.

Dalam menjalankan programnya Kabinet Ali II muncul berbagai peristiwa-peristiwa baru antara lain gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian KMB. Munculnya masalah anti Cina di antara kalangan rakyat yang kurang senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Selain itu, mulai meningkatnya sikap kritis daerah terhadap pusat. Kondisi ini mendorong lemahnya Kabinet Ali yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum pertama. Peristiwa-peristiwa di atas membuat kewibawaan Kabinet Ali Sastroamidjojo semakin turun. Kurangnya tindakan tegas dari kabinet terhadap pergolakan yang muncul membuat Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Masyumi menarik para menternya dari kabinet. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan kabinet oleh Ali Sastro dan Idham Khalid, namun tidak berhasil. Ali akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957.

Demisionernya Kabinet Ali II dan munculnya gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah membuat Presiden Soekarno mengumumkan berlakunya undang-undang negara dalam keadaan darurat perang atau *State van Oorlog en Beleg (SOB)* di seluruh Indonesia. Keadaan ini membuat angkatan perang mempunyai wewenang khusus untuk mengamankan negara.

Menyikapi situasi jatuh banggunya kabinet, Soekarno melalui amanat proklamasi 17 Agustus 1957 menyatakan bahwa:

"Sistem politik yang terbaik dan tercocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia! Ya, nyata demokrasi yang sampai sekarang ini kita praktikan di Indonesia, bukan satu sistem politik terbaik dan tercocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia! Nyata kita dengan apa yang kita namakan dengan demokrasi itu, tidak menjadi makin kuat dan makin sentosa, melainkan menjadi makin rusak dan makin retak, makin bubar dan makin bejat. (Presiden Soekarno, Amanat Proklamasi III, 1956-1960, Inti Idayu Press dan Yayasan Pendidikan Soekarno, 1986).

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengundang ke Istana Negara para tokoh partai dari tingkat daerah hingga pusat, dan tokoh militer untuk mendengarkan pidatonya yang dikenal dengan Konsep Presiden. Konsep tersebut bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan krisis kewibawaan kabinet yang sering dihadapi dengan dibentuknya kabinet yang anggotanya terdiri atas 4 partai pemenang pemilu dan dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya dari golongan fungsional dalam masyarakat. Sayangnya gagasan ini dikeluarkan tanpa terlebih dahulu ada pemberitahuan kepada kabinet yang tengah mengalami masalah yang cukup berat.

Presiden Soekarno menyatakan bahwa Demokrasi Liberal yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, dan merupakan demokrasi impor. Ia ingin menggantinya dengan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang disebutnya dengan Demokrasi Terpimpin. Konsep presiden ini menuai perdebatan yang cukup sengit baik di parlemen maupun di luar parlemen.

Usaha Presiden Soekarno untuk mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk kabinet berkaki empat akhirnya gagal. Kaum politisi dan partai-partai tetap mau melakukan politik "dagang sapi", yaitu tawar menawar kedudukan untuk membentuk kabinet koalisi. Akhirnya, Presiden menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur untuk membentuk kabinet ekstraparlementer yang akan bertindak tegas dan yang akan membantu Dewan Nasional sesuai Konsep Presiden. Soekarno berhasil membentuk Kabinet Karya dengan Ir. Djuanda, tokoh yang tidak berpartai, sebagai Perdana Menteri dengan tiga wakil perdana menteri masing-masing dari PNI, NU, dan Parkindo. Kabinet ini resmi dilantik pada 9 April 1957 dan dikenal dengan nama Kabinet Karya. Kabinet ini tidak menyertakan Masyumi di dalamnya.

Kabinet Djuanda merupakan Zaken Kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi:

- Membentuk Dewan Nasional
- Normalisasi keadaan Republik Indonesia
- Melanjutkan pembatalan KMB
- Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
- Mempercepat pembangunan

Dewan Nasional merupakan amanat dari Konsep Presiden 1957. Dewan ini mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan keinginan-keinginan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat dan juga sebagai penasihat pemerintah untuk melancarkan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik untuk mendukung

pembangunan negara. Dewan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno yang anggota-anggotanya terdiri dari golongan fungsional.

Untuk menormalisasi keadaan yang diakibatkan oleh pergolakan daerah, Kabinet Djuanda pada 10-14 September 1957 melangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan daerah, di antaranya adalah mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Musyawarah ini dilaksanakan di gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Musyawarah ini membahas permasalahan-permasalahan pemerintahan, persoalan daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian serta masalah dwitunggal Soekarno Hatta. Musyawarah ini kemudian menghasilkan keputusan yang mencerminkan suasana saling pengertian. Pada akhir acara Munas dibacakan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Soekarno Hatta yang bunyinya antara lain bahwa:

"... adalah kewajiban mutlak kami untuk turut serta dengan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah RI serta segenap alat-alat kekuasaan negara, membina dan membela dasar-dasar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam kedudukan apa pun juga adanya". (Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Dep.Kominfo, 2005)

Untuk menindaklanjuti hasil Munas, dan dalam upaya untuk mempergiat pembangunan dilaksanakan Musyawarah Nasional Pembangunan. Musyawarah ini bertujuan khusus untuk membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah. Oleh karena itu, kegiatan ini dihadiri juga oleh tokoh-tokoh pusat dan daerah serta semua pemimpin militer dari seluruh teritorium, kecuali Letkol. Achmad Husein dari Komando Militer Sumatera Tengah.

Perlu kalian ketahui bahwa pada masa Demokrasi Parlementer ini luas wilayah Indonesia tidak seluas wilayah Indonesia saat ini. Karena Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah, *Zeeën Maritieme Kringen Ordonantie, 1939* yang dalam pasal 1 menyatakan bahwa:

"laut territorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah (*laagwaterlijn*) dari pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan (*grondgebied*) dari Indonesia."

Berdasarkan pasal tersebut, Indonesia jelas merasa dirugikan, lebar laut 3 mil dirasakan tidak cukup menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan rakyat dan negara. Batas 3 mil dari daratan menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tersebut tanpa hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah Indonesia.

Sebagai suatu negara yang berdaulat Indonesia berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan Republik Indonesia. Melihat kondisi inilah kemudian pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara yang berbunyi:

Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/ mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. (Sumber: Hasjim Djalal, 2006)

Dari deklarasi tersebut dapat kita lihat bahwa faktor keamanan dan pertahanan merupakan aspek penting, bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu sendi pokok kebijaksanaan pemerintah mengenai perairan Indonesia. Dikeluarkannya deklarasi ini membawa manfaat bagi Indonesia yaitu mampu menyatukan wilayah-wilayah Indonesia dan sumber daya alam dari laut bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.



Sumber: Atlas Nasional Indonesia (Bakosurtanal, 2011)

Gambar 2.3 Wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda

Deklarasi Djuanda mengandung konsep bahwa tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa, seperti pada masa kolonial, namun harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional. Deklarasi Djuanda membuat batas kontinen laut kita diubah dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia semakin menjadi luas dari sebelumnya hanya 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² tanpa memasukkan wilayah Irian Barat, karena wilayah itu belum diakui secara internasional. Hal ini berdampak pula terhadap titik-titik pulau terluar yang menjadi garis batas yang mengelilingi RI menjadi sepanjang 8.069,8 mil laut. Meskipun Deklarasi Djuanda belum memperoleh pengakuan internasional, pemerintah RI kemudian menetapkan deklarasi tersebut menjadi UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Dikeluarkannya Deklarasi Djuanda membuat banyak negara yang keberatan terhadap konsepsi landasan hukum laut Indonesia yang baru. Untuk merundingkan penyelesaian masalah hukum laut ini, pemerintah Indonesia melakukan harmonisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Selain itu Indonesia

juga melalui Konferensi Jenewa pada tahun 1958, berusaha mempertahankan konsepnya yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda dan memantapkan Indonesia sebagai Archipelagic State Principle atau negara kepulauan.

Deklarasi Djuanda ini baru bisa diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ke-3 di Montego Bay (Jamaika) pada tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/ UNCLOS 1982). Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasinya dalam

No.17/ 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Setelah diperjuangkan selama lebih dari dua puluh lima tahun, akhirnya pada 16 November 1994, setelah diratifikasi oleh 60 negara, hukum laut Indonesia diakui oleh dunia internasional. Upaya ini tidak lepas dari perjuangan pahlawan diplomasi kita, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Prof. Dr. Hasjim Djalal, yang setia mengikuti berbagai konferensi tentang hukum laut yang dilaksanakan PBB dari tahun 1970-an hingga tahun 1990-an.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai Hari Nusantara dan ketika masa Presiden Megawati dikeluarkan Keputusan Presiden No. 126/2001 tentang Hari Nusantara dan tanggal 13 resmi menjadi hari perayaan nasional.

